
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI KAWASAN TRANSMIGRASI RAMBUTAN PARIT KABUPATEN OGAN ILIR

Sri Sulastr¹, Yanuar Saswita², Femi Asteriniah³, Syofyan⁴

^{1,2,4}) Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Stisipol Candradimuka Palembang

³) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Stisipol Candradimuka Palembang

Email Korespondensi: femi.asteriniah@stisipolcandradimuka.ac.id

Abstrak

Pola migrasi ini merupakan fenomena yang rasional dan dinamis dalam mencari kesempatan yang baru guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Akibatnya terjadi persebaran penduduk yang tidak merata. Secara garis besar pelaksanaan program transmigrasi dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari penyediaan calon lokasi transmigrasi, penyiapan pemukiman serta fasilitas umum, pengerahan dan penempatan, pembinaan masyarakat transmigrasi, kemudian diakhiri dengan penyerahan tanggung jawab pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) kepada pemerintah daerah. Di samping itu masih banyak pula kawasan-kawasan transmigrasi yang telah dibangun tetapi belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, kedepan paradigma pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) dilakukan dengan pendekatan “pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)”. Konsep pendekatan yang diterapkan adalah dengan melakukan revitalisasi pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada serta reorientasi pembangunan kawasan-kawasan transmigrasi yang baru menuju terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan dan selanjutnya disebut “Kota Terpadu Mandiri” (KTM). Adapun tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui hasil dari Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir. Bila dilihat dari jenis data dan teknik analisis yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data dan teknik analisis kualitatif. Dalam Penelitian ini telah dilakukan dengan baik, terlihat dari pengukuran 12 indikator masih ada kekurangan dan perlu diperbaiki terhadap 2 indikator 1) kejelasan sasaran penerima program, 2) jumlah sarana prasarana secepatnya dilakukan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.

Abstract

This migration pattern is a rational and dynamic phenomenon in seeking new opportunities to develop and improve the quality of life and welfare. As a result, there is an unequal distribution of the population. Broadly speaking, the implementation of the transmigration program is carried

out through stages of activities starting from providing prospective transmigration locations, preparing settlements and public facilities, deployment and placement, fostering transmigration communities, then ending with handing over the responsibility for fostering the Transmigration Settlement Unit (UPT) to the local government. In addition, there are still many transmigration areas that have been built but have not developed as expected. To accelerate the realization of new growth centers, in the future the paradigm of developing Transmigration Development Areas (WPT) and Transmigration Settlement Locations (LPT) is carried out with the "Development and Development of Independent Integrated City (KTM)" approach. The concept of the approach applied is to revitalize the development of existing transmigration areas and reorient the development of new transmigration areas towards the formation of growth centers that have urban functions and hereinafter referred to as "Independent Integrated Cities" (KTM). The research objectives are: To find out the results of the Development and Development of Independent Integrated City (KTM) in the Rambutan and Parit Transmigration Areas, Ogan Ilir Regency. When viewed from the type of data and analytical techniques used, this study uses qualitative data and analysis techniques. This research has been carried out well, it can be seen from the measurement of 12 indicators that there are still shortcomings and need to be improved on 2 indicators 1) the clarity of the target recipients of the program, 2) the number of infrastructure facilities for sustainable development as soon as possible.

Keywords: Evaluation, Policy, and development of City Development TerpaduMandiri

PENDAHULUAN

Sejalan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pemerintah Daerah, memberi kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengembangkan segenap sumber daya yang ada sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan daerahnya. Meskipun masing-masing daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda, namun perbedaan itu justru menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk berpindah ke daerah yang memberikan prospek yang lebih baik bagi diri dan keluarganya (Direktur Mobilitas Penduduk Departemen Tenaga Kerja RI, 2002: 18)

Berdasarkan pengertian ini, transmigrasi memiliki kaitan erat dengan aspek distribusi penduduk untuk keperluan terciptanya harmoni atau keseimbangan. Tetapi transmigrasi dalam maknanya yang sederhana itu sama sekali tidak menamfikkan hakikat transmigrasi yang sesungguhnya bercorak multidimensional. Pola migrasi ini merupakan fenomena yang rasional dan dinamis dalam mencari kesempatan yang baru guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Akan tetapi karena sarana dan prasarana serta tingkat kemajuan setiap daerah berbeda, penduduk akan

berpindah dari daerah asalnya ke daerah yang lebih maju pembangunannya. Akibatnya terjadi persebaran penduduk yang tidak merata. Kenyataan ini menunjukkan bahwa adanya kompleksitas dalam persoalan mobilitas penduduk yang saat ini terjadi. Karenanya pemerintah daerah maupun pusat perlu memberikan perhatian yang serius dalam mengatur pola migrasi yang terjadi. Perpindahan penduduk perlu diarahkan agar tidak terjadi *over populated* pada suatu daerah, sementara daerah lain penduduknya jarang. Dengan kata lain harus diupayakan bagaimana caranya agar persebaran penduduk yang terjadi dapat merata sesuai dengan kemampuan dan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan suatu daerah (Departemen Transmigrasi RI, 1997). Telah banyak keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan transmigrasi sampai saat ini, terbukti beberapa kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, seperti terbentuknya sejumlah ibukota kabupaten, ibu kota kecamatan, maupun pusat-pusat produksi pertanian. Namun disadari, bahwa proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 25 sampai 30 tahun.

Transmigrasi dalam maknanya yang sederhana berarti perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang. Disamping itu masih banyak pula kawasan-kawasan transmigrasi yang telah dibangun tetapi belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Belakangan ini terkesan di masyarakat, bahwa penyelenggaraan transmigrasi yang telah dilaksanakan hanya merupakan pemindahan penduduk dari desa ke kota. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi baik melalui Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Mandiri Berbantuan (TSM-B), Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM), Transmigrasi Inti Rakyat-Perkebunan (PIR-BUN), Transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat-Plasma (PIR-Trans), Transmigrasi Penataan, Transmigrasi Hutan Tanaman Industri (Trans HTI), Transmigrasi Pengembangan Desa Potensial (TRANSBANGDEP) dan transmigrasi berdasarkan keahlian, yang secara keseluruhan hasilnya dapat dilihat bahwa pembangunan transmigrasi mampu memberikan kontribusi bagi kinerja pembangunan nasional seperti pembukaan lapangan kerja baru, pertumbuhan pusat ekonomi baru dan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman serta infrastruktur lainnya yang turut mempercepat pembangunan di daerah.

Bertalian dengan upaya mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, paradigma penyelenggaraan transmigrasi saat ini berintikan lima pokok pemikiran yang menggariskan bahwa transmigrasi di selenggarakan untuk:

- 1) Mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan;
- 2) Mendukung ketahanan nasional;
- 3) Mendukung kebijakan energy alternative di kawasan transmigrasi;
- 4) Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan investasi di daerah;
- 5) Menunjang dan merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Guna mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, kedepan paradigma pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) dilakukan dengan pendekatan “pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)”. Konsep pendekatan yang diterapkan adalah dengan melakukan revitalisasi pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada serta reorientasi pembangunan kawasan-kawasan transmigrasi yang baru menuju terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan dan selanjutnya disebut “Kota Terpadu Mandiri” (KTM). Di kawasan transmigrasi yang sudah ada dilakukan penataan ekonomi, sosial dan ruang agar pertumbuhannya dapat lebih cepat dan terarah. Sedangkan di kawasan pembangunan transmigrasi baru, pembangunan transmigrasi yang semula ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan demografis, diperkaya orientasinya ke arah percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi. Jadi pada dasarnya Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi adalah terciptanya pusat pertumbuhan baru yang merupakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri, atau pusat usaha pertanian dari hulu ke hilir yang mampu menarik investasi swasta sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar dalam lingkup wilayah yang lebih luas, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha, dan pada akhirnya apabila proses tersebut berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan maka dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para transmigran dan penduduk sekitar di kawasan Kota Terpadu Mandiri tersebut. Dengan paradigma penyelenggaraan transmigrasi melalui Pembangunan dan

Pengembangan Kota Terpadu Mandiri ini ditargetkan tercapainya percepatan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru dalam waktu antara 10 – 15 tahun.

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1997, tentang Ketrasmigrasian, baru ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan UU Nomor 29 Tahun 2009 tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 ini belum mengatur secara rinci teknis pelaksanaannya, baik penyelenggaraan transmigrasi secara umum maupun pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri. Sehingga untuk program penyelenggaraan transmigrasi masih berpedoman pada Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.124/MEN/1990, tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi, yang mengatur secara rinci tentang “kegiatan penataan dan persebaran penduduk melalui perpindahan ke dan di wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan permukiman, pengarahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi sampai dengan penyerahannya kepada pemerintah daerah setelah 5 tahun”, sehingga kebijakan penyelenggaraan transmigrasi secara umum tetap dapat diimplementasikan, sedangkan kebijakan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri belum dapat diimplementasikan hingga akhir tahun 2006. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tersebut, secara substantif telah mengatur prinsip-prinsip pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri, namun belum mengatur mekanisme pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.214/MEN/V/2007, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi.

Secara nasional Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu (KTM) pertama kali ditetapkan tahun 2007, yaitu dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.220/MEN/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) tahun 2007. Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) ditetapkan

sebanyak lima kawasan yang terdapat dalam tiga Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 (tiga) kawasan, Provinsi Lampung sebanyak 1 (satu) kawasan, dan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 (satu) kawasan. Kawasan pengembangan transmigrasi di Sumatera Selatan terletak di tiga Kabupaten, yaitu: 1) Kawasan Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir, 2) Kawasan Belitang Kabupaten Oku Timur, dan 3) Kawasan Telang Kabupaten Banyuasin.

Pencanangan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, pertama di Indonesia dilaksanakan di Kawasan Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir. Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Kawasan Rambutan dan Parit berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang. Mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang di semua tingkatan Pemerintahan. Penyusunan Tata Ruang mulai dari skala nasional sampai pada skala daerah kawasan kota, dan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 86/TEKSTRA/2006, tentang Penetapan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Rambutan dan Parit.

Adapun sasaran Penetapan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Rambutan Dan Parit berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 86/TEKSTRA/2006 meliputi : a) Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; b) Peningkatan jaringan infrastruktur; c) Peningkatan investasi budidaya dan industry pertanian, jasa dan perdagangan; d) Perluasan kesempatan kerja; e) Peningkatan pelayanan social f) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); g) Peningkatan pendapatan para Transmigrasi dan penduduk sekitar. Fakta bahwa telah terjadi Banjir Tahun 2009 mengakibatkan beberapa sarana dan prasarana yang telah di bangun rusak dan hanyut oleh banjir. Kebakaran Lahan tahun 2010, mengakibatkan lahan perkebunan masyarakat banyak yang terbakar. Rendahnya minat masyarakat/warga transmigrasi untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh SKPD.

(Dwidjowijoto & Riant, n.d.) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan

publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai Peraturan Pelaksanaan. Selanjutnya (Dwidjowijoto & Riant, n.d.) menjelaskan lagi kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti undang - undang dan perda. Sedangkan, Van Meter dan Van Horn 2002:100, mendefinisikan implementasi kebijakan sbagai Tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu - individu atau pejabat - pejabat atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle sebagai berikut “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dan individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”. Dengan demikian implementasi kebijakan dapat di lihat sebagai proses kerjasama. implementasi kebijakan menuntut adanya kepentingan bersama, otoritas dan proses transaksi yang disepakati bersama. Sebagai proses persuasif, tawar menawar dan kerjasama, implementasi akan berahir ketika konsensus untuk menjalin koalisi akan terbentuk. Koalisi tersebut dibentuk dengan memberikan berbagai konsensi sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan.

Dengan memahami model-model Implementasi pada dasarnya dapat dibuat pemetaan model-model Implementasi dalam dua jenis pemilahan (Dwidjowijoto & Riant, n.d.) yaitu

1. Implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*Top Down*) versus dari “bawah ke atas”, atau pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentives*). Model mekanisme

paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa dalam Negara. Sebagian besar implementasi kebijakan berada pada model Top Down (Edwards III, Van Meter Van horn, Grindle, Mazmanian dan Paul Sabatier, Nakamura dan small wood);

2. Implementasi kebijakan yang berpola dari bawah ke atas (“*bottom up*“) bermakna meskipun kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat sebagai penerima. Diantara dua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat. Yang berada pada model “*Bottom Up*” yaitu (Adam Smith, Duun, Richard Elmore dkk, model jaringan), serta ada model yang berada di tengah-tengah yaitu model Goggi.

Menurut George C. Edwards III dalam (AG, 2005) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu a) komunikasi, b) sumber daya, c) sikap, d) struktur birokrasi. Kendati karyanya tidak pernah dikutip dan dibahas oleh para penulis Asing (Amerika dan Inggris) dalam buku tentang kebijakan public, khususnya dalam kajian tentang implementasi kebijakan, namun karya Edwards ini justru paling banyak dikutip oleh penulis dan pemerhati implementasi di Indonesia dibanding model yang dikembangkan oleh duet Van meter dan Van Horn. Dibanding tulisan Van Meter dan Van Horn yang hanya sebuah artikel, jbaran George C. Edwards III mengenai konsep-konsep yang dibahasnya jauh lebih dalam dan operasional. Mungkin karena alasan inilah karyanya banyak dikutip di dalam negeri, meski variable-variabel yang ia ajukan nyaris serupa, bahkan lebih sederhana dibanding dengan variable-variabel yang diajukan oleh pendahulunya.

Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu Context, Input, Process, dan Product. CIPP merupakan singkatan dari Context Evaluation artinya evaluasi terhadap Context, Input Evaluation artinya evaluasi terhadap masukan, Process Evaluation artinya evaluasi terhadap Process , dan Product

Evaluation artinya evaluasi terhadap hasil. Dengan melihat penjelasan tersebut, maka langkah evaluasi yang dilakukan adalah menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh (Russon & Russon, 2018) ini adalah : sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader dalam mengambil keputusan, di mana evaluasi sebagai suatu proses yang menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan dan membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator dengan membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

a. ***Contact evaluation to serve planning decision,***

Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan tujuan kerja yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.

b. ***Input Evaluation structuring decision,***

Evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang akan diambil, menentukan rencana yang matang, membuat strategi untuk mencapai kebutuhan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya tujuan program.

c. ***Process evaluation to serve implementing decision,***

Pada evaluasi proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Sampai sejauhmana rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan, serta adakah yang perlu diperbaiki dalam proses pelaksanaan program. Dengan demikian proses pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki.

d. ***Product evaluation to serve recycling decision,***

Evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan program yang digulirkan? Apakah memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya program tersebut? Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu program setelah

dilakukan evaluasi secara seksama. Manfaat model ini untuk pengambilan keputusan (*decision making*) dan bukti pertanggung jawaban (*accountability*) suatu program kepada masyarakat. Tahapan evaluasi dalam model ini yakni penggambaran (*delineating*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam proses evaluasi dapat dilakukan dari dua sisi yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kedua hasil evaluasi ini akan membantu staf dan pengguna program untuk melihat hasil yang dicapai dari program tersebut, kendala dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, kelemahan dan keunggulan untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian ini akan melakukan evaluasi kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan model evaluasi CIPP.

Menurut (Suharsimi, 1998) menjelaskan secara rinci terkait evaluasi model CIPP. Evaluasi context adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan. Evaluasi masukan (input), merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi masukan meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan.

Evaluasi hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Evaluasi product adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Secara garis besar evaluasi product meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, membandingkannya antara kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran yang rasional.

Penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir adalah penelitian yang berusaha menilai pemetaan pengembangan kawasan transmigrasi yang didasarkan atas beberapa prinsip agar tujuan pemetaan pengembangan untuk mengantarkan kawasan transmigrasi di Kawasan Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir menuju tingkat perkembangan yang diharapkan dapat dicapai.

Jika dilihat berdasarkan tujuan, penelitian ini tergolong dalam penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Penelitian terapan adalah bertujuan untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah yang telah diketahui untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. (Sugiyono, 1994)

Menurut pendekatan, penelitian ini tergolong dalam penelitian Evaluasi, Sugiyono berpendapat bahwa :Penelitian evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan fenomena. (Sugiyono, 1994)

Tingkat eksplanasi untuk penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri (Sugiyono, 1994) Variabel mandiri adalah Pengelolaan Kegiatan Pembangunan.

Bila dilihat dari jenis data dan teknik analisis yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data dan teknik analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. (Sugiyono, 1994)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir adalah penelitian yang berusaha menilai pemetaan pengembangan kawasan transmigrasi yang didasarkan atas beberapa prinsip agar tujuan pemetaan pengembangan untuk

mengantarkan kawasan transmigrasi di Kawasan Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir menuju tingkat perkembangan yang diharapkan dapat dicapai. Bila dilihat dari jenis data dan teknik analisis yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data dan teknik analisis kualitatif.

Sejalan dengan hal tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada kebijakan pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri (KTM) kawasan Rambutan dan Parit di Kabupaten Ogan Ilir. Adanya definisi operasional tersebut berarti terdapatnya indikator yang akan diukur dalam suatu penelitian. Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 1
Operasional Variabel
Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri
(KTM) di Kawasan Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir

Variabel	Dimensi	Indikator
Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Konteks	a. Kejelasan tujuan KTM yang hendak dicapai b. Kejelasan sasaran penerima KTM
	Input	a. Jumlah sumber dana b. Jumlah sarana prasarana c. Jumlah waktu yang digunakan
	Proses	a. Ketaatan Peraturan KTM yang Dijalankan b. Kinerja Pengembangan KTM c. Pemanfaatan KTM
	Produk	a. Jumlah keberhasilan KTM yang dilaksanakan b. Jumlah pemanfaatan infrastruktur yang diberikan c. Keberlanjutan KTM Rambutan Parit

Sumber : Evaluasi Sumatif Stufflebeam (2003: 2),

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada *Key Informans*;
2. Observasi, yaitu observasi non-partisipan. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian di UPT Rambutan dan Parit Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
3. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, seperti catatan, buku-buku, dokumentasi dan laporan.

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*), Tahapan model interaktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (Miles & Huberman, 2014)

a. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan untuk menyusun data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian atau laporan lengkap secara terinci, kemudian melakukan pemilihan data dengan tujuan untuk mendapatkan data pokok/penting yang selanjutnya mencari tema atau polanya.Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung sambil membuat ringkasan, dan menulis memo hingga laporan akhir secara lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat keseluruhan gambaran maupun bagian khusus dari penelitian.Penyajian data dapat dilakukan dengan cara menggunakan bagan (*chart*) atau dalam bentuk teks naratif (kumpulan kalimat). Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan dapat menarik kesimpulan secara tepat.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian, dan merupakan satu kegiatan dari bentuk/wujud yang utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pembenahan dan mencocok data secara terus menerus selama

penelitian berlangsung, mulai dari *getting in*, *getting along*, sampai dengan *logging the data*. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus menerus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian diatas, melalui indikator-indikator yang terdapat pada setiap definisi operasional Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir, sebagai berikut:

1. Context

Kejelasan tujuan program yang hendak dicapai dalam Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan baik dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Ogan Ilir. Bahkan Pemerintah telah merumuskan suatu pedoman KTM agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, melalui kegiatan yang berkelanjutan. Kejelasan sasaran penerima program Kota Terpadu Mandiri (KTM) Di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir belum mencapai sasaran yang tepat. Sasaran dari program KTM ini sudah ditentukan, tetapi belum spesifik membahas perorang atau individu. Seperti misalnya sasaran untuk desa terpencil, dilakukan program pelatihan pengajaran untuk gurunya, pengobatan gratis untuk masyarakatnya, peningkatan pengetahuan masyarakat.

2. Input

Keberhasilan tujuan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan, sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan segala hal (input) yang diperlukan. Salah satu input yang mendukung dalam pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir dikelola oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari Dana

APBN dan APBD, anggaran pendapatan belanja desa, swasta/lembaga keuangan/perbankan, masyarakat, sumber dana lainnya yang sah. Dalam Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dimana di tetapkan tiga arah sebagai panduan kegiatan, yakni pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dimana tahun 2008 saja, dana yang dikeluarkan untuk Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir adalah sebesar Rp.17,353,331,000 Sehingga harus dipastikan bahwa jumlah sumber dana dapat mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan program mencukupi. Pada Jumlah sarana prasarana belum lengkap, Rencana pelaksanaan belum diketahui, dimana saat ini pembangunan fasilitas baru dihentikan terlebih dahulu. Segera dilakukan sosialisasi pemanfaatan bangunan gedung pusat bisnis, bertujuan agar menarik minat investor untuk membuka kantor di kawasan tersebut. Pengembangan KTM Rambutan Parit ini telah disusun dan disepakati oleh perusahaan. Distimulasi untuk mampu tumbuh berkembang secara lebih cepat (± 10 sampai 15 tahun)

3. Process

Arah kebijakan penyelenggaraan program pembangunan transmigrasi dilaksana sesuai dengan UU No 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. Kinerja Pengembangan KTM memenuhi persyaratan dan kemudahan hubungan dengan pusat pertumbuhan. Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi mencakup pengembangan dibidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan & masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam dalam satu kesatuan. Pemanfaatan kawasan KTM Rambutan Parit terbukti telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Rencana Struktur Tata Ruang KTM, kebijakan penyelenggaraan program pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis Kawasan.

4. Product

Jumlah keberhasilan KTM yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik program dan anggaran telah memenuhi aspek pemanfaatan karena telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam mekanisme pembangunan dan pengembangan KTM. Pemanfaatan Infrastruktur Yang Diberikan telah dilakukan dengan baik terlihat pada program dan anggaran telah memenuhi aspek pemanfaatan karena telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam mekanisme pembangunan dan pengembangan KTM. Pembangunan infrastruktur kegiatan yang dilaksanakan oleh otorita KTM sangat banyak dan keberhasilannya juga hampir 80% KTM Rambutan Parit telah memenuhi konsep struktur tata ruang yang ditentukan, hal ini dapat dilihat bahwa WPT terdiri dari sembilan SKP (9 desa) dengan pusat KTM di Desa Rambutan Kecamatan Indalaya Utara. Program-program KTM yang dilakukan tidak sekedar basa-basi untuk mendapatkan perhatian masyarakat sekitar dan pemerintah daerah, tetapi benar-benar direalisasikan untuk kepentingan Pengembangan Masyarakat (Transmigran dan Penduduk sekitar).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik, terlihat dari pengukuran 12 indikator masih ada kekurangan dan perlu diperbaiki terhadap 2 indikator 1) kejelasan sasaran penerima program, 2) jumlah sarana prasarana secepatnya dilakukan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut secara rinci dijelaskan: Pada Indikator Kejelasan sasaran penerima program Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir belum mencapai sasaran yang tepat. Sasaran dari program KTM ini sudah ditentukan, tetapi belum tidak spesifik membahas perorang atau individu. Seperti misalnya sasaran untuk desa terpencil, kita lakukan program pelatihan pengajaran untuk

gurunya, pengobatan gratis untuk masyarakatnya, peningkatan pengetahuan masyarakat. Pada Indikator Jumlah sarana prasarana belum lengkap, Saat ini pembangunan fasilitas baru dihentikan terlebih dahulu. Segera dilakukan sosialisasi pembangunan Pusat Bisnis, bertujuan agar menarik minat investor untuk membuka kantor di kawasan tersebut.

Saran

Penelitian ini belum dapat melihat sejauhmana keberhasilan pencapaian tujuan, manfaat, dan dampak dari implementasi kebijakan karena prosesnya masih sangat panjang, oleh karena itu penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan ada pihak-pihak yang dapat melanjutkan penelitian ini, baik menggunakan pendekatan teori yang sama maupun dengan pendekatan teori yang berbeda sehingga dapat diketahui apakah kebijakan ini berhasil dengan baik atau gagal.
2. Untuk pencapaian tujuan akhir dari kebijakan KTM ini, penulis mencatat beberapa hal penting yang perlu dilengkapi, yaitu : (1) Penetapan Kawasan KTM haruslah dengan Keppres sehingga pengalokasian kegiatan dan anggaran terutama dari APBN dapat diakses oleh Kementerian terkait; (2) Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Pusat haruslah dengan Keppres, karena anggota Pokja tersebut ada yang berasal dari lintas Kementerian yang posisinya berada dalam garis koordinasi; (3) Kantor Pengelola KTM Rambut dan Parit perlu ditingkatkan statusnya menjadi Badan pengukuhannya dengan Perda agar kegiatannya dapat didukung dengan anggaran resmi melalui APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan; (4) Secara keseluruhan diperlukan adanya penyesuaian Perundang-undangan tentang penyelenggaraan transmigrasi yang dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), serta Peraturan Menteri (Permen) (Keppres), sehingga terbentuk keselarasan semangat dan peran antar ketiga tingkat pemerintahan pengelola KTM yaitu, tingkat Pusat; Provinsi dan Kabupaten sehingga masing-masing tingkatan merupakan sub-sub unit yang terbentuk dalam Kebijakan KTM tersebut.

Referensi

- AG, S. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Agustino Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. AIPI.
- Dwidjowijoto, N., & Riant. (n.d.). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasidan Evaluasi)*. Elex Media Komputindo-Gramedia.
- Miles, M., & Huberman, A. (2014). Miles and Huberman. In *Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook*.
- Russon, C., & Russon, K. (2018). Daniel Stufflebeam and The World Bank. *Evaluation and Program Planning*, 67, 184–188.
<https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.12.011>
- Sugiyono. (1994). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (1998). *Prosedur Penelitian*. PT. Rineka Cipta.

Sumber Lain

- Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1997, *tentang Ketransmigrasian*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Keputusan Menteri Transmigrasi RI Nomor : Kep. 124/MEN/1990, *tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi;*
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.214/MEN/V/2007, *tentang Pedoman Umum : Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri;*
- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :159/KPTS/TRANSDUK/2008, *tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Sumatera Selatan;*
- Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan. 2010. *Pedoman Pemetaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi*. Jakarta : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
- Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 200, *tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi Kawasan UPT Parit dan Sungai Rambutan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*.
- Pedoman Penulisan Proposal Tesis dan Penulisan Tesis MAP STISIPOL Candradimuka Palembang 2015